

GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI

Eko Wagiyanto¹, Umi Farida¹, Muslina², Abd. Hafid Amirullah³, Jamaluddin²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan demokratis kepala desa Lamatti Riawang dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan gaya kepemimpinan demokratis kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di kantor desa Lamatti Riawang, maka penarikan sampel dilakukan berdasarkan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, maka dalam penelitian ini penarikan sampel sebanyak 20 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik persentase dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Lamatti Riawang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai dikategorikan baik dilihat dari indikator pertama sampai indikator enam dengan menggunakan rumus analisis data, maka diperoleh skor sebesar 96,08%. Dengan demikian, skor tersebut dikonsultasikan pada pengkategorian sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto, berada pada rentang 76%-100% atau berada dalam kategori baik. Maka gaya kepemimpinan demokratis kepala desa Lamatti Riawang dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai kategori baik.

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan Demokratis

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Untuk penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)." (UU No. 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Perencanaan dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang lebih baik, selain itu perencanaan juga di mana arah dan kagiatanya terutama pada kegiatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut bangsa Indonesia melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang dikenal dengan pembangunan nasional.

¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik PPs UNM

² Alumni Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNM

³ Dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNM

Peran pemimpin dalam pemerintah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diharapkan secara berdayaguna dan berhasil guna, Hal ini sangat bergantung ada kesempurnaan peranan aparatur negara dalam melakukan tugas dan kewajibannya sebagai perencana dan pelaksana pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi prioritas utama. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdisiplin tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik guna mencapai efektifitas kerja yang diharapkan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan pemerintah wilayah kabupaten di dalam pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan dilengkapi dengan adanya aparat yang telah dibagi dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Di lain pihak dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan tersebut perlu didukung oleh aparat yang berkualitas, berdedikasi dan berdisiplin tinggi dalam rangka mencapai hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan namun kenyataan bahwa dalam pelaksanaan tugas terkadang pemerintah terhalang oleh pencapaian tujuan yang dikarenakan kualifikasi mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai.

Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Seorang pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota kelompok dengan menggunakan cara atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi dan mengkoordinasikan instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Karakteristik kepemimpinan kepala desa di manapun dan apapun tingkatannya adalah jelas yaitu kepala desa harus mempunyai kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain guna bersama-sama berjuang, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. Untuk mencapai Penyelenggara Pemerintah Desa Lamatti Riawang seorang kepala desa harus dapat mempunyai karakteristik yang dapat mendorong masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut Abdurrachman dalam Mappaenre (2006: 41-48) Sifat-sifat unggul kepemimpinan yang efektif secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut: jujur, berpengetahuan, berani (fisik dan moral), mampu mengambil keputusan, dapat dipercaya, bernisiatif, bijaksana, tegas, adil, menjadi tauladan, tahan uji (ulet), loyalitas, tidak mementingkan diri sendiri, antusias, simpatik, dan rendah hati.

Dalam pelaksanaan pembangunan umumnya di masyarakat pedesaan, pemimpin sangatlah penting karena pemimpin merupakan penggerak pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan, apabila ia mampu menggerakkan masyarakat dengan baik untuk mengadakan kerjasama yang baik. Keberhasilan pemimpin bersumber dari kepribadian pemimpin itu sendiri sebagai seorang insan. Perlu disadari bahwa pemimpin dan yang dipimpin adalah manusia, maka pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan tentang hubungan kemanusiaan.

Pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisasikan atau mengontrol usaha atau upaya orang lain untuk melalui prestise, kekuasaan atau posisi menurut Fairchild dalam Kartono (1994:33). Dengan demikian kepemimpinan berhubungan dengan manusia yang sifatnya selalu dinamis. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat

mempengaruhi orang lain agar ia mau bekerja, sehingga dapat membantu pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana diketahui desa merupakan tempat bertemunya semua kegiatan pembangunan desa, baik yang ditangani instansi pemerintah swasta termasuk perorangan. Pembangunan pedesaan dan penerapan kelestarian pembangunan penting untuk mendapatkan prioritas dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan maka pemerintah wajib membimbing dan mengarahkan serta menciptakan suasana yang menunjang sehingga antara kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling mengisi dan melengkapi, pengaturan penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan kepada usaha untuk memperkuat pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menjadi pusat perhatian pemerintah karena daerah pedesaan merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat desa berarti melaksanakan amanat dari cita-cita kemerdekaan dan merupakan kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan.

Sehubungan hal itu masyarakat harus benar-benar mampu menunjukkan tingkah lakunya untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan. Namun kenyataannya pada saat observasi di Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo masih banyak masyarakat belum dapat menunjukkan peran sertanya dalam mencapai tujuan seperti : Peran serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan, Gotong royong dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.

Hal itu disebabkan adanya pengaruh tidak baik dari dalam yaitu kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat pada masyarakat yang sulit dihilangkan seperti adanya pencurian, adanya jalan desa atau sarana desa yang tidak terawat baik dan tidak diperbaiki yang dapat menghambat perkembangan pembangunan di kecamatan Bulupoddo desa Lamatti Riawang. Untuk mengatasi pengaruh yang sifatnya negatif perlu adanya pengarahan, bimbingan serta motivasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan menyadari betapa pentingnya peran serta mereka dalam pembangunan. Hal itu juga tidak terlepas dari keberadaan kepala desa sebagai pemimpin dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa. Kepala desa pada dasarnya merupakan panutan dan penuntun serta memberi motivasi bagi masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.

Untuk mengukur variabel ini digunakan instrumen yang berupa angket yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada indikator-indikator variabel gaya kepemimpinan demokratis yang disebut dalam penelitian ini dengan menggunakan skala ordinal, skala ini mengurutkan data dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya dengan interval yang tidak harus sama. Dari penelitian berskala ordinal untuk selanjutnya diolah

dan dianalisis untuk mengungkapkan kategorisasi gaya kepemimpinan demokratis kepala desa, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto dalam Sulaiman (2014: 25), bahwa: a) 76% - 100% dikategorikan baik, b) 56% - 75% dikategorikan cukup baik, c) 40% - 55% dikategorikan kurang baik, dan d) Kurang dari 40% dikategorikan tidak baik

Sampel merupakan objek penelitian yang akan diteliti dalam rangka pengumpulan data. Sugiyono (2007: 73) berpendapat bahwa sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya sampel yang diambil, Arikunto (2000:240) mengemukakan:

Untuk sekedar acuan-acuan, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah besar dapat diambil 10 persen – 15 persen atau 20 persen -25 persen atau lebih, tergantung setidaknya-tidaknya dari kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dana dan sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek dan besar kecilnya resiko yang dihadapi peneliti. Maka dalam penelitian ini penarikan sampel dilakukan sebanyak 20 responden.

Analisis data hasil angket penelitian dilakukan dengan menggunakan rumus persentase yang dikemukakan oleh Sudijono (2014: 43) yaitu:

$$1. P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Dimana :

F = Frekuensi yang dicari persentasenya

N = Jumlah frekuensi/banyaknya individu

P = Angka persentase

Data-data hasil penelitian dengan menggunakan analisis persentase dari distribusi data yang didapatkan dari instrumen angket yang dituangkan dalam tabel tabulasi. Besar kecilnya persentase pada setiap option masing-masing item (pertanyaan) menjadi dasar interpretasi dalam menetapkan gaya kepemimpinan kepala desa. Adapun rumus persentase yang digunakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali (2013: 201) yaitu:

$$2. \% = \frac{n}{N} \times 100$$

Dimana:

% : Persentase

n : Nilai yang diperoleh

N : Jumlah seluruh nilai

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Lamatti Riawang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai”. Yang mana hasilnya berdasarkan jawaban angket yang diberikan kepada responden sebagai teknik utama dalam penelitian ini serta wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penunjang.

Untuk mengetahui bagaimana Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Lamatti Riawang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, maka diadakan analisis data presentase dari akumulasi nilai dari setiap option yang diperoleh dari 20 responden.

Skor data Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Lamatti Riawang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, adalah sebagai berikut:

- Jumlah skor yang diperoleh sebesar 1153
- Jumlah skor yang seharusnya ($4 \times 15 \times 20$) = 1200

Dari data tersebut selanjutnya dilakukan presentase pengujian skor sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100$$

$$\% = \frac{1153}{1200} \times 100$$

$$= 96,08 \%$$

Dengan menggunakan rumus analisis data sebelumnya, maka diperoleh skor sebesar 96,08%. Dengan demikian, skor tersebut setelah dikonsultasikan pada pengkategorian sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto, berada pada rentang 76% - 100% atau berada dalam kategori baik.

Pembahasan

Gaya kepemimpinan demokratis kepala desa adalah kemampuan kepala desa mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta senang mengembangkan kapasitas dari pribadinya sebagai pemimpin dan selalu menerima saran, pendapat, serta kritik dari bawahannya atau aparat desa, adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis sebagai berikut:

1. Wewenang pemimpin tidak mutlak merupakan kepastian pelaksanaan tugas-tugas kantor tidak mesti diputuskan oleh kepala desa semata-mata, kepala desa harus menggunakan suara terbanyak untuk memutuskan sesuatu harus melakukan musyawara dengan aparat desa supaya sebagian tugas dapat dikerjakan dengan baik oleh aparat desa. Karena kedudukan kepala desa sebagai penengah merupakan suatu sarana untuk membangun desa lebih baik kedepan
Wewenang kepala desa digunakan sebagaimana mestinya seperti menciptakan ikatan, hubungan formal dan kerjasama antara atasan dan bawahan dan kepala desa tidak terlihat memanfaatkan kewenangannya dalam pengambilan keputusan karena tidak pernah mengambil keputusan tanpa suara terbanyak dari aparat desa dan masyarakat lainnya.
2. Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan merupakan proses yang bertahap untuk menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja dan adanya hubungan kerja sama dalam suatu kantor antara kepala desa, aparat desa dan masyarakat. Kepala desa melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya berarti kepala desa mempercayai bawahannya dalam mengelola keuangan desa dan tugas-tugas kantor jadi bawahan telah mempunyai tanggung jawab dan pertanggungjawaban terhadap hasil pekerjaan kantor yang ingin dicapai.

Perlu diingat bahwa walaupun kepala desa melimpahkan wewenangnya akan tetapi wewenang tersebut tetap berada pada kepala desa karena pertanggungjawaban ada pada kepala, pengambilan keputusan dan kebijaksanaan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya. Setiap bawahan diusahakan agar hanya menerima perintah dari kepala desa tetapi seorang kepala desa dapat memerintah lebih dari seorang bawahan.

3. Keputusan Dan Kebijakan Dibuat Bersama Antara Pimpinan Dan Bawahan.

Keputusan dan kebijakan maksudnya keputusan yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak atau menguntungkan satu kelompok, pengambilan keputusan merupakan konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif serta mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat maupun menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu.

Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara kepala desa dan aparat desa atau bawahannya, pengambilan keputusan selalu dimusyawarahkan secara terbuka bersama aparat desa serta memutuskan suatu perkara dengan suara terbanyak dan kebijakan yang diterapkan kepala desa sesuai dengan hasil musyawarah mufakat antara kepala desa dan aparat desa demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah merupakan kebutuhan masyarakat oleh karena itu, setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan,

Yaitu memilih diantara beberapa alternative, yang akhirnya ditetapkan kebijaksanaan pemerintah.

4. Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar, maksudnya bijaksana, tindakan, perbuatan atau kegiatan yang menggambarkan pengertian yang sehat dan tetap mengenai jiwa seseorang yang mana dalam melakukan pengawasan yang ketat, tegas dengan kedisiplinan pegawai.

Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan ini patut kepala desa miliki sebagai penengah dan penyelesaian suatu tugas, setiap pengawasan, teguran, dan ketegasan perlu dilakukan oleh seorang kepala desa asalkan dalam batas kewajaran untuk menentramkan kehidupan masyarakat yang ada.

Sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan kepala desa terhadap pengawasan terutama dalam kedisiplinan pegawai kepala desa harus tegas pada pegawai agar pegawai datang ke kantor sesuai dengan jam masuk kantor yang telah disepakati jangan sampai lebih duluan datang yang mau dilayani daripada yang mau melayani.

5. Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan atau pendapat, tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat pemerintah dari pada instruksi.

Banyaknya kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran maksudnya kepala desa memberikan wewenang penuh kepada aparat desa dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor, suatu keterampilan dari seorang kepala desa menjadi pimpinan di kantor desa dalam memengaruhi tindakan orang lain, terutama kepada bawahannya atau aparat desa agar berfikir dan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga melalui tingkah laku positif ini

dapat memberikan sumbangan yang nyata didalam pencapaian tujuan pembangunan di desa.

Kepala desa sebagai pemimpin di suatu desa seharusnya mempunyai pengetahuan dalam mengorganisir setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Dalam hal ini kepala desa harus memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk menyampaikan saran dan kritik yang membangun serta leluasa mengutarakan pendapatnya tanpa suatu keraguan agar lebih mudah untuk pengambilan keputusan. Dan kepala desa juga harus memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk memberikan masukan atau pendapat dalam rapat atau musyawarah, misalnya dalam pembagian tugas kepada aparat desa harus diberikan dengan lebih bersifat permintaan dari pada intruksi.

6. Pemimpin memperhatikan dalam bersikap dan bertindak, adanya saling percaya, saling menghormati. Kepala desa harus memperhatikan sikap dan tindakan yang diambil misalnya kepala desa saling percaya dan saling menghormati kepada aparat desa agar dalam pengambilan keputusan keputusan segala sesuatunya mempunyai kemungkinan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dalam hasil keputusan hal ini kepala desa senantiasa harus mengantisipasi kejadian-kejadian yang merupakan manifestasi dari ketidak puasan masyarakat yang ada. Dari itu kepala desa harus dituntut untuk saling percaya dan saling menghormati kepada aparat desa khususnya.

Kepala desa kadang-kadang bertindak tanpa sepengetahuan aparat desa, dalam hal itu kepala desa harus bertindak dengan sepengetahuan aparat desa agar semua urusan lebih mudah untuk dijalankan karena untuk memutuskan suatu kegiatan pasti kepala desa melakukan dengan cara musyawarah dengan menghadirkan perangkat-perangkat desa dan masyarakat setempat. Karena Kemampuan mengambil keputusan adalah kecakapan untuk memecahkan suatu persoalan atau kegiatan dengan cepat dan tepat serta menyatakan pendapat mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara tepat pula. Semua kegiatan atau tugas-tugas yang ada di kantor lebih cepat selesai apabila kepala desa bersikap dan bertindak sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan oleh kepala desa dan aparat desa dan adanya saling percaya serta saling menghormati antara satu sama lain.

Dengan demikian, partisipasi kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa baik, kepala desa mampu mempengaruhi orang lain agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. wewenang kepala desa digunakan sebagai mestinya, tidak bertindak semaunya tanpa ada kesepakatan aparat desa dan kepala desa tidak pernah mengambil keputusan dengan memanfaatkan kewenangannya, kepala desa selalu memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk memberikan masukan atau pendapat dalam suatu rapat.

Dari hasil penelitian dan wawancara pada Desa Lamatti Riawang maka diperoleh keterangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa baik, apalagi menyangkut wewenang dan diadakannya pertemuan-pertemuan seperti rapat.

Menurut kepala dusun Paria 1 (wawancara, 15 Februari 2016) mengatakan bahwa:

Aktivitas di kantor kepala desa bapak kepala desa selalu ada ditempat, kecuali ada kegiatan lain, terkadang juga kegiatan-kegiatan untuk urusan pemerintahan di lakukan di rumah kepala desa atau dirumah aparat desa. Ini juga terkait dengan adanya kantor desa yang tidak memadai serta pekerjaan pribadi kepala desa seperti bercocok tanam,

Dengan demikian jelasnya bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala desa lamatti riawang kecamatan bulupoddo senantiasa diwarnai oleh kesibukan masing-masing baik kepala desanya maupun warganya yang sehari-hari bercocok tanam di kebun. Kegiatan dilaksanakan seperti pengurusan surat-surat, pengurusan pembayaran pajak biasanya di lakukan di rumah kepala desa atau di rumah aparat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis kepala desa Lamatti Riawang dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai dapat dilihat dari indikator pertama sampai indikator enam dengan menggunakan rumus analisis data, maka diperoleh skor sebesar 96,08%, dengan demikian, skor tersebut dikonsultasikan pada pengkategorian sebagaimana yang dikemukakan oleh arikunto, berada pada rentang 76%-100% atau berada dalam kategori baik. Maka gaya kepemimpinan demokratis kepala desa Lamatti Riawang dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai tergolong baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad. 2013. *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi* Bandung Angkasa
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan edisi revisi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mappaenre Ahmad, 2006. *Kepemimpinan*. Makassar
- Sudijono, Anas. 2014. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, 2007. *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: CV. ALVABETA
- _____, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- _____, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- UU Nomor 25 Tahun 2014 *Tantang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*